



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 815/V/2014

II/MEI 2014



Komisi VIII Temukan Sejumlah Masalah UN MTs Kaltim

Komisi VIII Temukan Sejumlah Masalah UN MTs Kaltim



Komisi VIII DPR RI menemukan sejumlah “catatan” dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Madrasah Tsanawiyah di Kalimantan Timur. Diantaranya adanya soal ganda dan soal yang tidak bersifat universal dalam mata pelajaran bahasa Indonesia.

Diungkapkan Ketua Tim Kunker Komisi VIII Kalimantan Timur, Ledia Amalia Hanifa terkait adanya soal ganda untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, dimana soal nomor 21 sama persis dengan soal nomor 22. Untuk sebagian siswa ini membingungkan apakah harus menjawab keduanya atau cukup satu saja. Untungnya hal tersebut dapat segera diatasi oleh pengawas tanpa merugikan siswa peserta UN.

“Jadi untuk soal ganda tersebut, pengawas sudah mengambil sikap dengan meminta siswa untuk menjawab salah satunya saja. Sementara soal lainnya, dibebaskan tanpa mengurangi nilai siswa alias menjadi bonus,” jelas Ledia kepada Parle baru-baru ini.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Mulyahrim yang ikut mendampingi Komisi VIII meninjau UN di lingkungan MTs menjelaskan bahwa soal ganda atau double tersebut terjadi di Balikpapan dan diduga terjadi akibat adanya kesalahan pada percetakan. Sementara di daerah lainnya di Kalimantan Timur termasuk Samarinda sejauh ini aman dan lancar.

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (**Sekretaris Jenderal DPR-RI**) | **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum | **PIMPINAN PELAKSANA:** Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | **PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (**Kabag Pemberitaan**) | **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Tri Hastuti (**Kasubag Penerbitan**), Mediantoro SE (**Kasubag Pemberitaan**) | **REDAKTUR:** Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono | **SEKRETARIS REDAKSI:** Suciati, S.Sos ; Ketut Sumerta, S. IP | **ANGGOTA REDAKSI:** Nita Juwita, S.Sos ; Supriyanto ; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati ; Muhammad Husen ; Sofyan Effendi | **PENANGGUNG JAWAB FOTO:** Eka Hindra | **FOTOGRAFER:** Rizka Arinindya ; Naefuroji; M. Andri Nurdriansyah | **SIRKULASI:** Abdul Kodir, SH | **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga mendapati di salah satu soal dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang tidak bersifat universal atau lintas agama. Dimana salah satu soal ada yang mempertanyakan bagaimana cara mengenakan atau menggunakan jilbab dengan baik.

“Bagi siswa non muslim, pertanyaan tersebut tentu cukup membingungkan, karena memang jilbab itu identik dengan agama Islam. Untungnya, pengawas mengambil langkah bijak dengan membebaskan soal tersebut dan menjadikannya “bonus” bagi siswa non muslim,” papar Ledia.

Walau sudah diambil langkah bijak mengatasi kedua permasalahan yang berkaitan dengan soal UN MTs itu, Ledia berharap agar hal tersebut tidak terulang kembali di UN yang akan datang, apalagi UN setingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah.

Sementara kekhawatiran adanya kasus serupa seperti yang terjadi dalam UN Tingkat SMA dan Madrasah Aliyah yang mencantumkan nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di naskah mata pelajaran bahasa Indonesia pekan lalu, tidak terulang pada UN SMP dan Tsanawiyah.

(Ayu) foto: ayu/parle/od.

Komisi VIII Apresiasi Dukungan Pemprov Kaltim



Anggota Komisi VIII DPR Ahmad Rubae'i.

Meski menemukan sejumlah catatan, namun Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dukungannya terhadap program pendidikan di daerah, khususnya pendidikan berbasis agama. Hal tersebut menurut Anggota Komisi VIII, Achmad Rubae'i terlihat dengan kondisi sekolah, ruang belajar dan berbagai fasilitas yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Samarinda, Kaltim yang terbilang cukup memadai.

“Disini kami melihat Pemprov Kaltim

cukup bagus menjalankan program pendidikan, dengan tidak membedakan jenis sekolah yang mendapat bantuan dari program APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), baik itu madrasah atau umum, sekolah negeri atau swasta memiliki hak yang sama, hal tersebut demi terciptanya pendidikan yang adil dan merata,” ungkap Rubae'i yang diamini Ketua Tim Kunker, Ledia Amalia Hanifa.

Selain mengunjungi MTsN Model Samarinda, Tim Kunker Komisi VIII yang diikuti Manuel Kaisiepo, Anwar

Yunus, Soemintarsih Muntoro, Sholeh Sua'idy, dan Ketut Sustiwawan ini juga mengunjungi Madrasah lainnya di Kalimantan Timur. Seperti MTs Antasari Swasta, MTs Labbaika Samarinda Seberang, MTsN I Balikpapan, dan MTs Asy Syi'fa Balikpapan.

Di beberapa daerah tersebut Komisi VIII menjangkau beberapa aspirasi di bidang pendidikan beserta sarana dan prasarana di dalamnya. Misalnya di MTsN I Balikpapan, Komisi VIII mendapati kondisi gedung atap sekolah yang jebol. Padahal saat itu tengah berlangsung UN.

Syahri Romadi, Kepala Sekolah MTsN I Balikpapan mengatakan bahwa pembangunan gedung tersebut termasuk baru. Besar kemungkinan hal tersebut dikarenakan kelalaian pengembang proyek pembangunan gedung sekolah tersebut.

Tidak hanya itu, Syahri juga mengatakan jika musim penghujan tiba sekolah tersebut menjadi langganan banjir. Mengingat posisi sekolah yang berada di dataran rendah dan berdekatan dengan parit (kali). Melihat hal tersebut Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa meminta agar sekolah segera mengatasi hal tersebut.

“Ini harus segera diatasi, karena jelas akan selalu mengganggu proses belajar mengajar,” tambah Ledia yang diamini anggota Tim Kunker Kaltim lainnya.

Ditambahkan Rubae'i, sebagai ang-

gota legislatif yang salah satu fungsinya adalah *budgeting* atau anggaran, pihaknya akan menyetujui usulan penggunaan anggaran untuk program perbaikan tersebut. Namun tentunya terlebih dahulu ada usulan dan laporan dari pihak sekolah kepada Kementerian Agama Pusat yang menaunginya.

“Sangat jarang kami tidak menyetujui usulan anggaran untuk pendidikan. Tapi tentunya hal itu harus dibarengi

dengan laporan dan usulan penggunaan anggaran yang benar. Jika memang APBD dan APBNP saat ini tidak memungkinkan. Kami menyarankan untuk memasukkan usulan tersebut ke dalam anggaran Kementerian Agama Pusat lewat APBN mendatang,” kata Rubae’i dihadapan Wakil Walikota Balikpapan, Heru Bambang.

Sementara itu Wakil Walikota Balikpapan, Heru Bambang mengatakan

bahwa dukungan dari DPR RI sangat penting demi terciptanya kualitas pendidikan yang baik. Untuk dapat menciptakan kualitas pendidikan yang baik diperlukan sarana, prasarana termasuk di dalamnya fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu ia berharap agar saran anggota Komisi VIII dapat segera dilaksanakan oleh pihak sekolah, sehingga perbaikan sekolah pun dapat segera dilakukan. (Ayu) foto: rizka/parle/od.

AEC 2015 Masih Hadapi Tantangan Serius



Suasana Seminar “Menyongsong Perubahan ASEAN Economic Community 2015”.

Menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2015, negara-negara ASEAN tampaknya masih menghadapi tantangan serius. Namun, itu bukan berarti tidak bisa diselesaikan di tingkat regional. Dialog terus dilakukan untuk menyelaraskan kebersamaan sebagai komunitas ASEAN.

Setidaknya ada 3 tantangan yang masih mengganjal menyambut AEC 2015, yaitu penerapan sistem hukum yang berbeda-beda di antara negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, masih ada konflik perbatasan di antara

negara-negara ASEAN yang belum selesai. Dan yang tidak kalah pentingnya sebagai tantangan AEC 2015 adalah keterlibatan masyarakat sendiri yang masih kurang di setiap negara ASEAN.

Demikian disampaikan Rainer Louhanapessy, *Minister Counsellor of The Republic of Indonesia to ASEAN*, pada Seminar bertema “Kesiapan Produk Legislasi Dalam Menyongsong Perubahan ASEAN Economic Community 2015” di ruang Pansus B Nusantara II DPR RI, Rabu (7/5). Acara yang dimotori Deputi

PUU Setjen DPR RI, itu menghadirkan pula dua pembicara lainnya, Bambang Prijambodo (staf ahli Menteri PPN) dan Benardino Moningga Vega (Wakil Ketua Kadin Komite ASEAN).

Seminar ini untuk memperkaya materi dan perspektif dalam menyusun berbagai produk legislasi di DPR. Untuk itu, Setjen DPR sangat berkepentingan dengan agenda AEC 2015 tersebut dan telah mempersiapkan personilnya yang mumpuni guna membantu prolegnas terutama yang terkait dengan isu AEC 2015.

Menurut Rainer, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menyambut AEC 2015, perlu sosialisasi yang massif. Di Thailand, masyarakatnya mulai mempelajari bahasa Indonesia untuk menyambut AEC 2015. Dengan begitu, rakyat Thailand tidak asing dengan produk dan komunitas Indonesia yang masuk ke negaranya. Indonesia perlu mencontoh Thailand.

Sementara itu, Bambang Prijambodo mengungkapkan, daya saing Indonesia menyambut AEC 2015 masih lemah di semua sektor. Ada 6 sektor yang perlu perhatian, yaitu industri, pertanian, perdagangan, investasi, perbankan, dan tenaga kerja. Namun demikian, Indonesia tak perlu takut menghadapi agenda ASEAN di tahun 2015, karena merupakan bangsa yang besar. Ditekankan Bambang, dengan AEC 2015 ini, Indonesia tak perlu terjebak pada liberalisasi yang berlebihan. (mh) foto: andry/parle/od.



DPR Kecewa Pergantian dan Ralat Soal UN Bingungkan Siswa



Anggota Komisi X DPR Zulfadhli saat diwawancara wartawan.

Permasalahan demi permasalahan tetap saja ditemukan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Seperti yang ditemukan Parle pada UN hari pertama tingkat SMP di SMP Negeri 10 Padang, Senin (5/5), adanya lembaran ralat mata pelajaran Bahasa Indonesia yang membingungkan para siswa.

Misalnya, Delfi siswa Kelas IX SMP Negeri 10 Padang ini saat ditemui Parle terlihat bingung. “Lembaran utama soal nomor 1 sampai nomor 5 tidak ada, langsung ke soal nomor 6 hingga nomor 45. Kemudian soal nomor 46 sampai nomor 50 juga tidak ada,” kata Delfi kepada Parle usai melaksanakan UN.

Menurutnya, dirinya mendapatkan dua lembar soal yang terpisah satu sama lain. Satu lembar soal utama dan yang lainnya lembar tambahan. Ternyata di lembar tambahan ada soal nomor 1 sampai nomor 7 dan soal nomor 46 sampai nomor 50. Soal nomor 6 dan nomor 7 ganda di lembar

utama dan juga di lembar tambahan. “Dari pihak guru mengatakan, soal yang dipakai dan dijawab terdapat di lembar jawaban,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Indang Dewata mengakui ada sedikit kendala dari segi penulisan naskah soal ujian Bahasa Indonesia, seperti soal yang sama, soal yang kosong dan lainnya, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi.

Menurutnya, naskah soal UN itu secara keseluruhan berasal dari pusat dan apabila terdapat kekeliruan pada naskah tersebut, maka akan ada konfirmasi dari pusat. “Alhamdulillah, meskipun sedikit ada kendala, pelaksanaan UN tingkat SMP di Kota Padang pada hari pertama ini berjalan dengan lancar dan kondusif,” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Zulfadhli merasa kecewa dan menyayangkan ada temuan pergantian soal atau ralat soal, karena ini membingungkan siswa,

Politikus dari Partai Golkar ini lebih sepakat bila soal yang di ralat itu diganti bonus dan tidak perlu diganti dengan lembaran baru. Kalau diganti dengan soal baru akan membuat bingung dan mengganggu secara psikologis siswa. “Jadi adanya soal salah cetak, anggap saja itu bonus,” tukas Zulfadhli.

Ia berharap, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi kedepannya. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Komisi X akan mengundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan permasalahan ini. “Tentu kami akan mempertanyakan dan mengusut penyebab terjadinya persoalan ini dalam Rapat Kerja antara Komisi X dengan Kemendikbud nantinya,” imbuhnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Tunjangan Sertifikasi Guru Belum Tingkatkan Mutu Pendidikan

Komisi X DPR menilai persoalan guru merupakan permasalahan yang tidak pernah tuntas. Dua permasalahan utama yang ada terkait guru, yaitu soal kewenangan dan jaminan karir guru.

Anggota Komisi X DPR Zulfadhli menilai pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan terhadap karir guru. Banyak guru yang diangkat, kemudian

diberikan tunjangan, namun kualitasnya tidak mampu mendongkrak dan meningkatkan mutu pendidikan.

“Ini akibat kewenangan pengelolaan guru diserahkan ke kabupaten/kota karena faktor otonomi daerah,” ujar Zulfadhli di sela-sela memantau pelaksanaan UN 2014 di SMPN 8 Padang, Senin (5/5) lalu. Ia menambahkan,

sebaiknya kewenangan guru ditata ulang. Dimana sebagian diserahkan ke provinsi dan sebagian ke pusat.

Hal ini, lanjutnya, supaya guru profesional. “Kalau sekarang guru hanya jadi objek politik saja,” tegasnya. Kewenangan yang bisa diserahkan ke pusat seperti dalam rekrutmen guru. Kemudian, aturan untuk memindah-



Anggota Komisi X DPR Zulfadhli saat pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan jajarannya.

kan guru tidak bisa lagi sewenang-wenang oleh pemerintah kabupaten/kota, namun diserahkan ke pusat. “Soal pembinaan karir, setelah diangkat diberikan tunjangan sertifikasi dan

setelah itu jangan dibiarkan. Harus diserahkan ke provinsi untuk mengatur pembinaan karir guru,” jelas Zulfadhli.

Lebih jauh dia menjelaskan, pembe-

rian tunjangan sertifikasi guru ternyata belum mampu meningkatkan mutu pendidikan. Ini dibuktikan capaian nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) rata-rata nasional hanya 40. Untuk itu, kata Zulfadhli, pemerintah harus menyiapkan pola pembinaan. Selain itu, perlu diberikan *reward* dan *punishment* terhadap guru. “Masalah kewenangan dan jaminan karir guru ini akan kita bahas dalam Panitia Kerja (Panja) nantinya,” jelasnya.

Sementara Sekdaprov Sumbar Ali Asmar mengatakan, ada beberapa hal yang diusulkan ke Komisi X, yaitu kewenangan untuk wajib belajar sembilan tahun menjadi fokus kabupaten/kota. Untuk tingkat SMA bila diserahkan ke Pemprov akan dilakukan dua upaya. Yaitu, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan mempersiapkan siswa ke dunia kerja. “Bila tingkat SMA ini diserahkan ke provinsi, tentu kita upaya terkait mutu dan bina kerjaan,” ujarnya. (iw) foto: iwan armanias/parle.

Kesalahan Naskah Soal UN Tanggungjawab Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bertanggungjawab terhadap kesalahan naskah soal Ujian Nasional tingkat SMP/MT di Jawa Timur. Pasalnya, ditemukan beberapa kesalahan dalam naskah soal, dimana tidak adanya soal nomor 13 pada soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto saat meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs di SMP Negeri 5 Surabaya, Senin (5/05). Dalam kunjungan kerja ini, Komisi X juga mendatangi SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 6 Surabaya.

“Kami tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Akan kami cek apakah *master* soalnya bermasalah atau bagaimana. Kami harus klarifikasi kenapa soal nomor 13 ini tidak ada. Ini persoalan penting. Dulu waktu UN SMA, ada soal yang bermasalah karena menyebutkan salah satu calon presiden. Itu soalnya nomor 13. Nah, sekarang soal UN tingkat SMP yang tidak ada juga



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto saat meninjau pelaksanaan UN di SMPN 5 Surabaya

nomor 13. Ada apa ini,” kata Agus seolah bertanya.

Menurut Politisi Demokrat ini, kesalahan sebagian naskah yang tidak

memuat soal nomor 13 ini bukan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Pelaksana UN di lapangan. Namun, Agus tidak ingin menduga

apakah soal nomor 13 ini berkaitan dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi atau tidak, sehingga nomor soal dihilangkan untuk mencegah adanya politisasi UN.

“Saya tidak mau berandai-andai. Yang jelas sekarang nomor 13 tidak ada. Setelah masa reses, kami ada rapat kerjadengan Kemendikbud. Ini materi yang sangat penting dan pasti akan kami tanyakan ke Mendikbud,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala

Dinas Pendidikan Jatim Harun menyatakan bahwa kesalahan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Pasalnya, Pemerintah Daerah hanya sebatas penyelenggara saja.

“Kami tidak dalam konteks pengadaan soal. Kami hanya penyelenggara saja. Kami tahu tadi pagi saat soal diumumkan. Tapi kami harapkan hal ini tidak merugikan peserta UN,” jelas Harun.

Harun memastikan pihaknya tidak melakukan penarikan atau merevisi naskah soal UN. Ia juga menjamin soal

UN tidak ada keterkaitan dengan Jokowi.

“Poin pentingnya di sini, tidak ada politisasi di UN Jatim. Kalau soal nomor 13 tidak ada itu sudah diselesaikan dengan tanpa merugikan siswa,” ujarnya.

Dari hasil pantauan di lapangan, dari 20 paket soal mata pelajaran Bahasa Indonesia, ternyata ada 3-4 paket yang tidak memuat soal nomor 13. Bahkan, ada juga yang memuat nomor soal ganda, yaitu nomor 40. (sf) foto: sofyan/parle/od.

Perbaiki UN Harus Terus Dilakukan



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto saat berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan jajarannya.

Pelaksanaan Ujian Nasional sebagai instrumen evaluasi pembelajaran anak didik dan bahan untuk melakukan pemetaan kualitas mutu pendidikan nasional masih perlu ditingkatkan kualitasnya. “Oleh karena itu semangat untuk perbaikan ujian nasional harus terus dilakukan,” ujar Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto kepada wartawan di sela-sela peninjauan UN di SMP Negeri 8 Padang, Senin (5/5).

Selain itu, jelas Utut, Komisi X juga telah berhasil mendorong dua hal perubahan kebijakan yang signifikan terkait dengan UN pada tahun 2014. Pertama, UN tingkat SD/MI mulai tahun 2014 tidak diselenggarakan lagi dan diganti dengan Ujian Sekolah (US).

Kedua, ditetapkannya nilai Murni Tahun 2014 bersama nilai rapor dan prestasi lain untuk jenjang SMA/SMK/MA menjadi dasar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2014. Komisi X juga telah menyetujui alokasi anggaran untuk Ujian Nasional 2014 sebesar Rp 560 Miliar dalam APBN Tahun Anggaran 2014. Utut berharap persiapan UN 2014 dapat dipersiapkan sebaik mungkin agar kualitas UN 2014 meningkat dari tahun 2013, baik dari sisi materi soal, pelaksanaan, pengawasan, dan keluaran atau output.

Utut menambahkan, Komisi X juga akan mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 SMP Negeri 10 Padang untuk mendapatkan masukan terkait dengan persoalan, kendala dan hambatan yang muncul dalam persiapan pelaksanaan UN 2014. Sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan pada rapat kerja antara Komisi X dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (iw) foto: iwan armanias/parle.

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Berjalan Lamban

Komisi IV DPR menilai pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo Yogyakarta sangat lamban. Pasalnya sejak mulai dibangun pada tahun 2005 silam, hingga kini Pelabuhan tersebut belum dapat dioperasikan.

“Kunjungan Kerja Komisi IV DPR

ke Propinsi DI Yogyakarta salah satunya untuk mengetahui masalah terkait pembangunan Pelabuhan itu. Apakah pembangunannya mengalami kendala atau tidak,” jelas Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzyi usai pertemuan dengan jajaran Pemda DI Yogyakarta di Gedung Pracimosono Kepatihan Yog-

yakarta Senin (28/4) siang.

Romahurmuzyi mengatakan, proses pembangunan Pelabuhan berjalan lamban. Pasalnya, target awal Pelabuhan ini beroperasi 2013 lalu. Namun, berdasarkan pengakuan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yog-



Tim kunker Komisi IV DPR saat pertemuan dengan Wakil Gubernur DIY dan jajarannya.

yakarta Andung Prihardi Santoso, pada akhir tahun ini baru akan dilakukan *soft launching*.

“Proses pembangunan Pelabuhan sudah terlalu panjang karena dibangun sejak tahun 2005 silam. Tapi kalo untuk beroperasi membutuhkan waktu sembilan tahun lamanya, memang hal seperti ini merupakan waktu yang lama,” kata Romi panggilan akrabnya.

Meski demikian, Komisi IV DPR tetap berkomitmen mendukung penyelesaian pembangunan Pelabuhan tersebut. Malahan, mereka siap *support* penyempurnaan fasilitas darat yang menjadi tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Proses percepatan untuk operasi awal ini juga harus didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk

penyediaan pemecah ombak yang selama ini menjadi kendala utama pengoperasian. Jadi, tujuan utama agar dana yang sudah digelontorkan selama ini tidak sia-sia,” tegas Ketua Komisi IV DPR.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Andung Prihardi Santoso mengakui jika proses penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto terkendala pembangunan *break water* atau pemecah ombak. Pasalnya, secara geografis posisi pelabuhan langsung berhadapan dengan lautan atau tidak terlindungi oleh teluk atau laguna seperti yang ada di Pelabuhan Sadeng Gunung Kidul.

“Kami prediksi pada November sudah bisa dilakukan *soft launching*. Pasalnya Pemerintah pusat sudah menganggarkan lima belas milyar rupiah untuk pengerukan. Dan saat ini, tinggal menunggu pemenang lelang untuk proses pengerukan tersebut. (Spy).foto: supriyanto/parle/od.

Komisi X Terkejut Penggunaan Dana BOS Untuk UN SMP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR saat memantau langsung pelaksanaan Ujian Nasional 2014 tingkat SMP di Kota Padang terkejut karena adanya laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menyelenggarakan UN.

Pasalnya, banyak sekolah di Kota Padang yang menggunakan Dana BOS untuk Ujian Nasional. “Ini cukup mengkhawatirkan, ternyata anggaran APBN untuk UN tidak mampu mengcover sehingga sekolah mencari anggaran lain di luar itu. Ini mengkhawatirkan,” ujar Zulfadhli dari Fraksi Golkar kepada wartawan di sela-sela memantau pelaksanaan UN di SMPN 10 Padang, Senin (5/5).

Menurut politikus dari Fraksi Golkar ini, bila penggunaan Dana BOS dilakukan pihak sekolah, nantinya bisa menimbulkan kasus hukum. Sebab,



Anggota Komisi X DPR Zulfadhli.

kata Zulfadhli, masing-masing anggaran tersebut sudah ada alokasinya. Tadi ada seorang kepala sekolah di salah satu SMP Kota Padang yang mengakui memang memakai dana BOS untuk UN. “Ini perlu kita cermati, jangan sampai nanti pelaksanaan UN justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Sementara saat ini kita sedang memperbaiki sistem pelaksanaan UN,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis Dikbud Kota Padang, Indang Dewata mengatakan awalnya memang ada rencana penggunaan dana BOS untuk menanggulangi kekurangan dana penyelenggaraan UN. Namun sampai saat ini belum ada sekolah yang menggunakan dana tersebut. “Tak ada sekolah yang pakai dana BOS untuk UN. Kita tetap upayakan dengan dana UN yang telah disediakan,” bantahnya.

Penyelenggaraan UN SMP Kota Padang pada hari pertama berjalan lancar. Adapun jumlah peserta 13.427 siswa dari 86 SMP sederajat. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X dipimpin Wakil Ketua Utut Adianto dengan anggota lintas fraksi yakni Nurul Qomar, Muslim, Zulfadhli, Irsal Yunus, Ahmad Zainuddin, Ibrahim Sakty Batubara, Abdul Kadir Karding, Jamal Mirdad, dan Muchtar Amma. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

DPRD Harus Dorong Masyarakat Tidak Apatis

DPRD di setiap daerah hendaknya mendorong masyarakat untuk tidak apatis terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, termasuk laporan keuangan daerah. Masyarakat justru harus diajak berpartisipasi aktif memberi masukan dan saran atas semua laporan pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti saat menerima Delegasi Anggota DPRD Kabupaten Bone, Selasa (6/5). Didampingi Kepala Biro Analisa Keuangan dan Pelaksanaan APBN Setyanta Nugraha, Win mengatakan, masyarakat punya hak untuk mengetahui semua bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Namun, tak bisa dinafikan bahwa masyarakat sendiri kadang enggan mengetahui semua laporan tersebut.

“Karena ada hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya seyogyanya DPRD sebagai wakil masyarakat mendorong agar tidak apatis menanggapi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah,” papar Win.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti saat menerima Delegasi Anggota DPRD Kabupaten Bone.

Sementara Delegasi DPRD Kabupaten Bone, Sulsel mendatangi Sekretariat Jenderal DPR untuk mengetahui perihal PP No.3/2007 tentang LPPD, LKPJ, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD Bone telah membentuk pansus LPJ untuk mengetahui lebih detil bagaimana sebenarnya penjelasan atas PP tersebut. Ketika Pemda menyusun laporan keuangan daerah, apakah ada sanksinya bila ternyata ditemukan ada kesalahan penyusunan.

Win menjelaskan, kesalahan dalam menyusun laporan keuangan daerah

bisa saja menurunkan peringkat daerah tersebut. Untuk itulah, sekali lagi Win menegaskan, perlu partisipasi masyarakat untuk ikut mengontrol keuangan daerah. Dan kehadiran delegasi DPRD Kabupaten Bone ini sangat bagus sebagai bentuk kepedulian daerah dalam mengelola keuangan.

“Kalau seluruh daerah sudah memulai seperti ini bagus. Mudah-mudahan penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah,” ungkap Win. (mh)
foto:andri/parle/od

DPRD Berkepentingan Mengetahui Agenda Kerja DPR



Suasana pertemuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dengan Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

Menjelang masa akhir persidangan DPR RI, banyak agenda kerja yang mesti segera diselesaikan, terutama menyangkut RUU yang belum rampung. DPRD di daerah turut berkepentingan mengetahui agenda kerja di DPR RI, karena secara tidak langsung berpengaruh juga terhadap agenda kerja daerah.

Demikian mengemuka dalam pertemuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dengan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, Senin (5/5). Hadir pula Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Tatang Sutharsa. Delegasi

DPRD Gorontalo Utara yang dipimpin Ketua DPRD Muksin Badar berkonsultasi langsung dengan Sekretariat Jenderal DPR RI soal mekanisme pengambilan keputusan, penentuan masa reses, dan beberapa agenda kerja DPR lainnya di akhir masa sidang.

Ada perbedaan krusial antara DPRD dan DPR RI. Pelantikan anggota baru

untuk DPRD Kabupaten dilangsungkan pada 26 Agustus. Sementara untuk DPR RI pada 1 Oktober. Perbedaan jadwal pelantikan juga membedakan jadwal pembahasan anggaran antara DPR RI dan DPRD.

Sementara soal aturan reses di DPR RI, Win menjelaskan, hanya ada 4 kali dalam 4 kali masa persidangan. Di akh-

ir masa jabatan tidak ada reses, karena sesuai dengan kode etik DPR. Pada bagian lain, Win juga mengungkapkan, ada 102 RUU menyangkut daerah otonomi baru (DOB). 71 di antaranya sedang dibahas di Komisi II DPR. Jadi, ini membutuhkan perhatian segera untuk dibahas. (mh) foto:andri/parle/od

Pemerintah Diminta Sikapi Vonis Mati 683 Warga Mesir

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ai Muzammil Yusuf menyatakan prihatin atas vonis hukuman mati 683 orang yang ditetapkan Pengadilan Mesir. Pemerintah Indonesia menurutnya perlu menyatakan sikap terhadap keputusan yang melanggar HAM tersebut.

“Rakyat dan Pemerintah Indonesia harus mengecam vonis biadab, tidak manusiawi yang memvonis hukuman mati secara berjamaah kepada warga negaranya tanpa proses pengadilan yang benar. Ini melanggar HAM dan Hukum Internasional,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (4/5/14).

Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia Untuk Palestina ini menyebut pengadilan yang dilakukan terhadap warga Mesir pelaku unjuk rasa menentang pemerintah dilakukan terlalu cepat. Para terdakwa yang jumlahnya ratusan ini juga tidak diberikan waktu memadai untuk membela diri, bahkan tanpa didampingi pengacara.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, apalagi dengan jumlah penduduk muslim terbesar sudah sepatutnya Indonesia menyuarakan penolakan terhadap keputusan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Presiden SBY tandasnya dalam kapasitas yang tepat untuk menggalang penolakan dari komunitas internasional.

“Presiden SBY sebagai representasi rakyat perlu menggalang dukungan komunitas internasional terutama negara-negara Islam untuk menggagalkan vonis mati tersebut,”



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ai Muzammil Yusuf.

tekan Politisi Fraksi PKS DPR ini.

Ia menyebut Mesir sebagai salah satu negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. “Demokrasi Mesir telah jauh mundur ke belakang, ini harus jadi pelajaran bagi kita,” demikian Muzammil. (iky)foto:odjie/parle/od.

Kemendikbud Harus Usut Kasus Plagiat Soal UN

Kredibilitas Ujian Nasional kembali dipertanyakan. Pasalnya, ditemukan soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMP yang persis sama dengan soal buatan *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2012. Hal ini

sama saja dengan bentuk plagiatisme, dan pemerintah bisa dituntut oleh PISA.

“Saya mendengar ada soal matematika pada UN SMP yang sama dengan

soal PISA tahun 2012. Kalau ini benar, sangat menodai kredibilitas UN itu sendiri. Berarti pembuat soal memang tidak benar dalam menyusun soal. Ini masalah serius. Jangan sampai merusak kredibilitas UN,” ujar Anggota

Komisi X DPR Zulfadhli, ketika ditemui usai acara Semangat Pagi, di Gedung Nusantara II, Kamis (8/05).

Politisi Golkar ini meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengusut tuntas kasus plagiat ini. Harus ada pihak yang bertanggungjawab.

“Kita minta Mendikbud mengusut siapa yang bertanggungjawab dalam pembuatan soal. Yang pasti, di Kemendikbud ada unit pembuat soal, mereka harus dimintai pertanggungjawabannya, dan diberikan sanksi kepada pihak yang sengaja membuat soal *copy paste* seperti ini,” imbuh Zul, panggilan akrab Zulfadhli.

Politisi Dapil Kalimantan Barat ini menilai, seharusnya soal buatan pihak lain itu cukup dijadikan referensi, bu-



Anggota Komisi X DPR Zulfadhli.

kan dijiplak semuanya.

“Kalau hanya untuk referensi atau dimodifikasi, ya tidak masalah. Tapi ini katanya dijiplak habis. Makanya, kita akan minta penjelasan kepada Mendikbud,” ujar Zul.

Dari berbagai pemberitaan di media, perbandingan antara soal UN Matematika SMP dengan soal tes PISA terlihat bahwa angka dan urutan pilihan jawaban kedua soal itu persis sama. Bahkan menggunakan gambar yang jelas-jelas ada tulisan di sumbernya dilarang untuk diambil karena terkait hak cipta terhadap merek *Skysails*. Laporan terkait soal PISA dalam UN Matematika SMP dilaporkan oleh seorang guru swasta di wilayah Banten.

Masih dari media, dikabarkan beberapa waktu lalu Mendikbud Mohamad Nuh menyatakan soal UN tahun ini sengaja diselipkan soal-soal berstandar dunia. Tujuannya selain untuk pemetaan kualitas pendidikan Indonesia secara riil. Kemudian berfungsi untuk penilaian kualitas pembelajaran Indonesia sesuai dengan pemeringkatan PISA. (sf)foto: *iwana armanias/parle*.

Kalangan DPR Dukung Perppu Perpanjang Rekapitulasi Hasil Pileg

Meski masih berpegang pada optimisme KPU untuk mengumumkan penetapan hasil pemilu legislatif pada Jumat (9/5), namun kalangan DPR mendukung dikeluarkannya Perppu untuk memperpanjang rekapitulasi hasil pileg. Demikian dikemukakan anggota DPR KH Aus Hidayat Nur dan Zulfadhli saat dihubungi Parle Kamis (8/5) terkait masih banyaknya daerah yang belum menyerahkan rekapitulasi pileg yang digelar 9 April lalu.

Hingga Kamis (8/5) dini hari, baru ada 22 provinsi yang hasil rekapitulasinya telah disahkan oleh KPU, yaitu; Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, Papua Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau dan Papua.

Sementara yang belum disahkan ada 11 provinsi, yaitu; Jabar, Sumut, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara

Timor, Maluku Utara, dan Bengkulu.

Menurut Zulfadhli, kalau memang pada *dead line* tanggal 9 Mei KPU tetap belum menyelesaikan rekapitulasi, maka Presiden harus menyiapkan Perppu. Dengan demikian dia berharap tidak adanya pelanggaran hukum dan semua proses tahapan pemilu tidak terhambat termasuk Pilpres.

“Kita harus optimis dulu, tetapi kalau tanggal 9 higgga pukul 00.00 ternyata KPU tidak mampu maka, Presiden harus menyiapkan Perppu. Saya dukung dikeluarkannya Perppu, “kata politisi Partai Golkar ini.

Hal senada dikatakan, Aus Hidayat Nur, sebaiknya ditunggu sampai KPU melaporkan hasil rekap pada tanggal 9 Mei. Kalaupun tenggat waktu tidak dipenuhi, menurutnya sebagai hal yang wajar bila Presiden mengeluarkan Perppu.

Kelambatan rekap oleh KPU, kata Aus, terjadi karena kerumitan system pemilu dengan system proporsional terbuka. Tidak menyangka kecurangan di beberapa daerah terjadi sehingga



Anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur.

KPU susah untuk memperoleh data secara cepat. “Saya kira kecurangan marak karena kebiasaan di pilkada banyak KPUD nakal yang melakukan jual beli suara,” tegas anggota Komisi II ini.

Pembuatan Draf

Seperti diberitakan, Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono telah memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memfasilitasi pembuatan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk perpanjangan masa rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno Mendagri pun telah memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo untuk mempersiapkan

draf tersebut jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta.

Kemendagri sendiri tidak akan menerbitkan Perppu tanpa ada permohonan dari KPU sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU harus mensahkan rekapitulasi perolehan suara di tingkat nasional tersebut 30 hari setelah pemungutan suara. Artinya, sisa waktu yang dimiliki KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi nasional

tinggal satu hari hingga Jumat (9/5). Padahal, hingga Kamis dini hari, masih ada 14 provinsi yang belum disahkan perolehan suaranya oleh KPU Pusat.

“Kami belum pikirkan (Perppu Perpanjangan Rekapitulasi). Komitmen kami di tingkat nasional adalah bagaimana secara prosedural administrasi rekapitulasi ini terpenuhi. (Yang penting) masuk ke nasional sudah clear, kalau ada problem di daerah akan dicermati dulu,” kata Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah. (mp)

Ditlantas Itu Beranda Depan Kepolisian



Anggota Komisi III DPR Dimiyati Natakusumah.

Upaya Kapolri untuk melakukan pembersihan di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dan Jawa Timur merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Kebijakan ini perlu diperluas ke daerah lain karena Ditlantas merupakan beranda depan, penentu wajah kepolisian.

“Polisi itu penegak hukum sementara Ditlantas itu beranda depan polisi, tempat memberikan pelayanan pada masyarakat. Kalau di sana banyak penyimpangan bahkan pelanggaran hukum, bagaimana? Jadi bagus kalau Kapolri bertekad menata menjadikan zona tertib hukum,” kata anggota Komisi III DPR RI, Dimiyati Natakusumah di Jakarta, Rabu (8/5/14).

Politisi Fraksi PPP ini menekankan Kapolri perlu bekerja keras membersihkan direktorat ini karena publik banyak mengalami pengalaman buruk pada saat mengurus administrasi SIM, STNK dan surat administrasi berkendara lainnya. Calo berkeliaran, suap menyuap, sembrawut dan ketidaktertiban seperti ironi nyata di institusi negara yang memiliki tugas utama menertibkan.

“Kalau namanya muka itu harus jadi perhatian. Langkah Kapolri bekerja sama dengan KPK membenahi ini, bagus sekali. Beri sanksi tegas bagi yang melanggar, terutama petugasnya,” tegas wakil rakyat yang pada Pileg lalu bertanding di Dapil DKI III.

Dalam keterangannya kepada wartawan Wakil Kapolri Komjen Badrotin Haiti membenarkan sebagian perwira Ditlantas di Polda Metro Jaya dan Jatim telah mendapat sanksi mutasi. Mereka terjaring dalam Operasi Senyap yang dilakukan Propam dan Paminal Mabes Polri serta didukung KPK. Uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga untuk suap berhasil disita.

“Kebijakan mutasi itu agar mereka melakukan introspeksi tentang apa yang sudah mereka lakukan,” demikian penjelasan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronny Frangky Sompie. (iky) foto: iwan armanias/parle.

Komisi X Wacanakan Penghapusan UN Tingkat SD dan SMP

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Syamsul Bachri, yang memimpin Tim Kunjungan Spesifik Ke Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan akan membawa wacana penghapusan Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk dibahas di Dewan.

“Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) bagi SD dan SMP akan kami bawa ke pusat sehingga bisa sepenuhnya direalisasikan,” ujarnya disela-sela peninjauan pelaksanaan UN di SMPN 1 Kecamatan Landasan Ulin dan SMPN 1 Kota Banjarbaru, Banjarbaru Kalimantan Selatan, Senin (5/5) lalu.

Menurut dia, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baik tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat bukan untuk mencari kelulusan akhir sekolah bagi siswa, melainkan sebagai langkah pemetaan guna mengetahui kualitas pendidikan.

Lulus atau tidaknya siswa setelah mengikuti UN tidak bisa dijadikan patokan kualitas pendidikan apalagi kualitas siswa antara Pulau Jawa dan provinsi lainnya. “Materi Ujian Nasional (UN) disamakan se-Indonesia sementara kualitas pendidikan antar satu daerah dengan daerah lainnya berbeda sehingga tentu persentase kelulusan lebih tinggi di daerah yang kualitasnya sudah bagus,” ungkap Syamsul.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mewacanakan penghapusan Ujian Nasional (UN) bagi murid Sekolah Dasar (SD) dan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan menyerahkan ujian ke daerah masing-masing sehingga materi soal ujian disesuaikan kualitas setempat.

“Daerah melalui Dinas Pendidikan dan unsur terkait lainnya yang lebih berperan dalam menyusun soal-soal yang diujikan. Tentunya disesuaikan kualitas pendidikan sehingga seluruh siswa bisa menjawab soal,” ujarnya.



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri saat konferensi pers.

Penghapusan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu juga sejalan dengan program nasional pemerintah yakni wajib belajar sembilan tahun sehingga seluruh peserta didik harus lulus dari sekolah hingga SMP.

Menanggapi pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini, Anggota Komisi X DPR Dedy Gumelar mengatakan, pelaksanaan sudah lebih bagus baik dari sisi naskah soal yang tidak terlambat maupun kualitas kertas yang juga lebih baik.

“Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sudah lebih baik karena tidak ada lagi naskah soal yang terlambat. Kualitas kertas juga bagus tidak seperti pelaksanaan UN tahun lalu,” ujarnya. Dalam kunjungan ini Tim Komisi X DPR didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kalsel

Ngadimun dan Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru Ahmadi Arsyad.

Selain usulan penghapusan UN SD-SMP, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Syamsul Bachri berpendapat, Ujian Nasional untuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) pada tahun-tahun mendatang sebaiknya ditiadakan.

“Peniadaan atau penghapusan UN SMP/MTs itu dimaksudkan untuk lebih menunjang dan menyukseskan program pendidikan sembilan tahun,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan UN SMP/MTs 2014, di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. “Karena itu, kami akan mengusulkan kepada pemerintah agar meniadakan sistem Ujian Nasional (UN) bagi pelajar SMP/MTs,” ia menambahkan. (hr) foto: eka hindra/parle.

DPR Desak Pemerintah Serius Lindungi WNI

Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mendesak pemerintah segera membantu WNI yang ditahan imigrasi Malaysia saat melahirkan anak di rumah sakit Kuala Lumpur.

“Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah WNI yang ditahan pihak imigrasi Malaysia sebagai wujud bentuk perlindungan Pemerintah terhadap warganya,” kata Poempida dalam keterangan pers tertulisnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika pemerintah tidak bertindak sesegera mungkin, maka hampir dapat dipastikan tren kekerasan terhadap WNI akan terus terjadi.

Selanjutnya menurut dia Poepimda yang juga wakil ketua Timwas TKI DPR RI ini, berdasarkan informasi yang diterima Timwas TKI DPR RI, pada tanggal 13 April 2014, WNI bernama Siti Sudarni (AR 428087) telah melahirkan anak bernama Kenzie Abid Amarullah pada 14 April 2014 di RS umum Kuala Lumpur, dan setelah itu oleh pihak imigrasi Malaysia, Siti Sudarni langsung



Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh.

ditahan dengan alasan tidak jelas.

“Pada 29 April 2014, suami Siti Sudarni bernama Supriyanto (Paspor AR 705727), telah menerima surat petunjuk Imigrasi (IM.101/A/889/7/56) untuk memajukan pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KBRI, tetapi prosedur ini telah ditolak oleh loket No. 12, 15 dan 24 dengan alasan dokumen Imigrasi Malaysia tidak lengkap,” katanya.

Ibu dan anak itu menurut Politisi

Golkar ini, ditangkap sehari selepas melahirkan anak dan surat keterangan kelahiran ikut bersama ibu ditahan Imigrasi Bukit Jalil.

“Oleh karena itu, Timwas TKI DPR RI meminta pihak Konsular untuk membantu Ibu dan anak dalam pengurusan SPLP untuk pemulangan mereka ke Indonesia, dan atas alasan kondisi anak yang masih terlalu muda, kami mohon kedua ibu dan anak agar bisa dipulangkan ke tanah air,” tegas Poempida. (ant/nt) foto: odjie/parle/od.

Pengawasan Sekolah Harus Diperketat

Kasus kematian Renggo Khadafi, siswa kelas lima SDN Makassar 09, Jakarta Timur, yang tewas setelah dianiaya kakak kelasnya, sempat mencuri perhatian masyarakat luas. Banyak pihak menyayangkan kematian Renggo. Renggo sebelumnya diduga dianiaya kakak kelasnya, SY, pada Senin (28/4) lalu. Tragisnya, aksi penganiayaan itu terjadi di dalam kelas.

Anggota Komisi X DPR RI Oelfah A. Syahrullah Harmanto menilai, masih ada kelalaian dari sekolah terkait pengawasan. Tapi, bukan berarti sekolah perlu memperketat pengawasan, tapi harus memastikan murid dalam kondisi aman.

“Kasus kekerasan pada anak ini saya sampai bingung dimana letak salahnya. Pengawasan sekolah harusnya diperketat. Tapi dalam artian bukan hanya menjaga, tapi juga diberi pengertian. Justru pendekatan kepada murid

itu yang kurang,” jelas Oelfah ketika ditemui di Surabaya, dalam rangka kunjungan kerja, Senin (5/04).

Politisi Golkar ini menilai, anak-anak yang melakukan kekerasan, mungkin saja kekurangan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya. “Anak-anak ini mungkin kurang kasih sayang. Sehingga perlu diberi pengertian. Anak sekarang kalau dikerasi malah makin menjadi,” ujar politisi asal Dapil Sulawesi Selatan ini.

Tidak menutup kemungkinan, tambah Oelfah, pelecehan seksual maupun kekerasan pada anak terjadi di tempat lain, bukan hanya di Jakarta dan Sukabumi. Ia memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berani melaporkan dan mengungkap berbagai kejahatan dan pelecehan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto menyatakan masalah kekerasan anak ini



Anggota Komisi X DPR RI Oelfah A. Syahrullah Harmanto.

sudah menyentuh pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum, sehingga harus ditindak secara tegas.

“Namun, kita juga harus lihat latar belakangnya juga, bagaimana proses belajar mengajarnya di sekolah, kenapa sampai terjadi seperti itu. Ini merupakan ujian berat bagi kita, tentang pendidikan, kenapa harus terjadi seperti ini. Bisa juga sekolah seolah-olah memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk berbuat tidak baik,” jelas Agus.

Politisi Demokrat ini menegaskan, ke depannya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus mengusut tuntas masalah ini.

“Ke depannya, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, harus dibasmi. Masalah yang terjadi ini harus diusut secara tuntas. Apakah sekolah memberikan kesan kurang tanggap terhadap kejadian ini, harus diusut secara menyeluruh. Ini juga harus kita bahas dengan Kemendikbud,” jelas Agus.

Sebagaimana pemberitaan di media, tindak penganiayaan terhadap Renggo bermula saat korban tanpa sengaja menenggol minuman milik pelaku hingga terjatuh. Saat itu, Renggo minta maaf dan memberi ganti rugi minuman seharga Rp1.000. Namun entah mengapa, pelaku tak mau menerima dan malah menganiaya korban di dalam kelas. Bahkan saat pulang sekolah, pelaku kembali menganiaya korban hingga tersungkur.

Tak cukup sampai di situ, pelaku juga memukul korban dengan menggunakan gagang alat pembersih lantai. Setibanya di rumah, korban mengeluh kesakitan dan mengadakan peristiwa itu pada ibu asuhnya. Namun karena korban menderita muntah darah, akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramatjati. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, korban akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu (4/5) pukul 01.00. Korban lalu dimakamkan di TPU Kampung Asem, Kebon Pala. (sf) foto: hr/parle.

Kenaikan TTL Pengaruhi Pembangunan Rumah Murah

Kementerian ESDM segera memberlakukan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk dunia industri. Tentu ini dikeluhkan kalangan industri nasional, karena banyak sekali dampak yang muncul, baik ekonomi maupun sosial.

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait (F-PDI Perjuangan), Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat dan Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Kaca Pengamana Yustinus Gunawan, menggelar konferensi pers, Kamis (8/4), di Press Room DPR untuk menanggapi kenaikan tersebut.

Berdasarkan Permen ESDM No.9/2014, kenaikan TTL untuk industri golongan I-3 (*go public*) dengan daya di atas 300 Kva sebesar 38,9%. Untuk industri besar golongan I-4 dengan daya 30 ribu Kva ke atas sebesar 64,7%. Kebijakan kenaikan ini dikeluarkan pada 1



Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait saat konferensi pers.

April lalu dan mulai diberlakukan pada 1 Mei 2014.

Strategi kenaikannya diberlakukan dalam 4 tahap. Untuk golongan 1-3 Mei-Juni 8,6% (Rp872/kwh), Juli-Agustus 17,8% (Rp946/kwh), September-Oktober 27,9% (Rp1.027/kwh), dan November-seterusnya 38,9% (Rp1.200/kwh). Maruarar menilai, pemerintah tidak pro industri nasional. Kebijakan energi listrik nasional tidak jelas. “Ini jelas menunjukkan perencanaan di bidang kelistrikan tidak baik. Masa

dalam 2 tahun naiknya besar seperti itu. Peraturannya baru dibuat April dan diberlakukan Mei,” kata Maruarar.

Industri yang terpukul oleh kenaikan TTL ini adalah industri baja, tekstil, semen, dan kaca. Menurut Ade Sudrajat, dampak kenaikan TTL sangat kompleks, dari menurunnya produksi, ancaman PHK karyawan, inflasi meningkat, kontribusi pajak menurun, dan investasi terhambat. Ditambahkan pula oleh Maruarar, kenaikan TTL berdampak pada pembangunan rumah murah

bagi rakyat, karena industri semen ikut terganggu.

“Kita berharap pemerintah dan DPR bersama-sama apapun partainya untuk bisa sama-sama membangun solusi. Saya pikir kita cari solusi, kita kasih kado yang baiklah di masa periode 2009-2014 ini,” tandas Maruarar. Sementara itu, kalangan industri berharap, kenaikan itu dibagi secara bertahap selama 2 tahun, bukan 1 tahun seperti diatur dalam Permen ESDM tersebut. (mh) foto: andry/parle/od.

Pelaksanaan UN di Padang Berjalan Lancar



Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sumbar.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP/Sederajat Tahun 2014 di Kota Padang meski ada kendala tetapi pada umumnya berjalan lancar. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Prov.Sumbar) diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Ali Asmar, di Kantor Gubernur Prov.Sumbar, Senin (5/5) yang lalu.

Menurutnya, kendala itu diantaranya soal UN ada yang kurang seperti nomor 45. Karena itu Komisi X akan membahas pada rapat dengan Kemendikbud RI pada masa persidangan mendatang. “Tentu kita juga harus tahu soalnya, kita tidak bisa mengandai-andai, tapi perlu ada laporannya,” jelasnya.

Permasalahan lain kata Utut, perlunya pertimbangan-pertimbangan, apakah masih perlu UN untuk tahun-tahun mendatang. Kalau pembobotan sekarang 60%-40%, UN 60% dan 40% Ujian Sekolah (US) di mata pelajaran yang tidak diujikan di UN. Kedepan, apakah maksud untuk memetakan dan meningkatkan kualitas ini sudah sepadan dengan kesulitan di lapangan yang hampir tidak mungkin bisa diatasi pada saat yang bersamaan.

“Komisi X DPR RI telah meninjau secara langsung UN ke SMP Negeri 8 dan SMP Negeri 10 Padang. Mengingat UN melibatkan begitu banyak nasib murid sekolah, maka Komisi X hadir ke Kota Padang,” ujar Utut.

Seperti halnya di Kota Padang ini, Komisi X akan selalu turut mengawasi dan memperhatikan beberapa gejala,

kekurangan, dan hal-hal lain demi memajukan kualitas pendidikan termasuk menyelesaikan UN.

“Pertimbangan utama kami ke Sumbar karena sepanjang sejarah republik ini berdiri, wilayah ini menyuplai cerdas-pandai yang paling banyak di tanah air,” tegas Utut.

Politisi PDI Perjuangan ini juga memaklumi bahwa berdasarkan data saat ini pendistribusian guru juga masih repot. “Bayangkan saja guru di Kota Padang masih kekurangan, demikian pula di kota-kota yang lain maupun di daerah Timur, seperti di Kepulauan Mentawai,” jelasnya.

Intinya, Komisi X akan berupaya membuat Panitia Kerja (Panja) perihal Kewenangan Pengaturan Guru kewenangan di daerah. “Karena kami memahami kewenangan itu seringkali membuat maksud baik jadi tidak bisa dieksekusi di lapangan,” imbuhnya.

Sementara itu Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar mengatakan, Pemprov. Sumbar mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat dan Komisi X DPR RI untuk peningkatan pendidikan, baik di tingkat SLTP maupun di tingkat SLTA.

“Harapan kita masalah pendidikan tidak dimasuki oleh unsur-unsur politik. Pendidikan adalah benar-benar memikirkan persoalan pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan,” tandas Ali Asmar. (iw)/foto:iwan armarias/parle.

Meski Reses, DPR Tetap Tanggap Permasalahan di Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat tak lama lagi akan memulai masa persidangan. Namun, sebelumnya, DPR menjalani masa reses yang cukup panjang. Dimulai 6 Maret lalu, dan berakhir 11 Mei 2014

Selama masa reses, banyak terjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang cukup menyita perhatian, kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak. Menyikapi hal, diperlukan sikap tanggap untuk menindaklanjuti masalah ini.

Untuk itu, Komisi X menerima audiensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dari audiensi ini, Komisi X mendapatkan masukan terkait UU Perlindungan Anak.

“Kami ingin Komisi X tidak diam saja. Komisi X tetap tanggap dalam menghadapi permasalahan pelecehan seksual di sekolah internasional itu dan kekerasan anak yang terjadi di beberapa daerah. Ini betul-betul memilukan dan sangat disayangkan. Ini memberikan pengaruh terhadap pendidikan Indonesia,” jelas Agus, ketika ditemui di

Surabaya, Senin (5/04) lalu.

Politisi Demokrat ini menyatakan, mengingat urgensi dari audiensi ini, Komisi X harus tanggap untuk menangani permasalahan ini. Sehingga, keresahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan.

“Kami Komisi X merelakan waktunya ketika berada di Dapil, untuk datang ke Jakarta, saya pribadi juga datang, untuk menerima audiensi dengan KPAI. Hasil audiensi ini akan kita bahas dengan Kemendikbud. Ini efek positif yang harus kita bina dan dukung terus, dalam masa reses pun Anggota Dewan masih bisa melakukan pekerjaannya,” imbuh Agus.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

Selain Komisi X, dalam masa reses ini, Komisi VIII juga menerima audiensi dengan KPAI dan Komisi IX melaksanakan rapat untuk membahas panja *outsourcing*. (sf) foto: odjie/parle/od.

Soal Skandal Century, Semua Harus Didengar Kesaksiannya

Menyusul kesaksian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Pengadilan Tipikor soal skandal Bank Century, sudah selayaknya semua pihak yang mengetahui skandal tersebut harus didengar kesaksiannya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI Maruarar Sirait (F-PDI Perjuangan), Kamis (8/5) di Press Room DPR. Skandal Century ini sebetulnya sudah sangat jelas. Penengak hukum tinggal meneruskan saja temuan yang didapat dari DPR dan BPK. Bahkan BPK sendiri sudah memberikan hasil audit forensik dan audit investigasi.

“Jadi, saya rasa masalah Century ini



Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.

harus menjadi masalah hukum yang adil. Jangan dipolitisir oleh siapapun,”

kata Maruarar. “Audit BPK,” sambung Maruarar, “Tinggal diteruskan saja. Semua harus didengar kesaksiannya. Kasus ini sudah 5 tahun, dimulai 2009 awal. Masa sampai sekarang enggak selesai juga.”

Menurut Maruarar, pandangan dari para saksi kunci harus dihormati, seperti Jusuf Kalla, Sri Mulyani, dan Boediono. Kasus ini sudah masuk ke wilayah hukum. “Jangan sampai opini yang dibanggunkan mempengaruhi proses hukum. Kita harus dukung KPK. Menurut saya, KPK sudah *on the track*. Yang bisa saya sampaikan, kita memberi dukungan bahwa KPK bisa menuntaskan masalah ini,” tandas Maruarar. (mh) foto: andry/parle/hr.



Suasana Ujian Nasional 2014.

Foto: Eka Hindra, Iwan Armanias/Parle.





Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI pantau pelaksanaan Ujian Nasional SMP/Sederajat 2014 di Kalsel, Sumbar, dan Jatim.

Foto: Eka Hindra, Iwan Armanias, Sofyan/Parle.





RUU KEBUDAYAAN: CIPTAKAN SUASANA HARMONIS ANEKA RAGAM BUDAYA INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan bersatu dalam kebhinekaan. Di tengah peradaban dunia yang terus berkembang, kekayaan Indonesia ini perlu dipelihara dan dikembangkan, sehingga jati diri bangsa Indonesia dapat dipertahankan terhadap pengaruh globalisasi.

Saat ini, telah terjadi perubahan tata nilai bangsa Indonesia sebagai akibat

adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi, sehingga bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya yang berdampak negatif dalam masyarakat.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Dengan artian, masyarakat dapat mengembangkan nilai-nilai budayanya, dengan tetap memelihara keasliannya.

"Kebudayaan nasional Indonesia melalui pengelolaan kebudayaan



beradaban. Sehingga, dengan adanya RUU Kebudayaan ini, pengelolaan dan kekayaan bangsa dapat dialihgenerasikan secara berkelanjutan,” tambah Politisi PAN ini.

Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini menambahkan, RUU inisiatif DPR ini akan memuat pengaturan mengenai pengelolaan kebudayaan meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian kebudayaan. Perencanaan pengelolaan kebudayaan disusun berdasar rencana induk pengelolaan kebudayaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

”Diharapkan, dengan adanya pengelolaan kebudayaan, dapat meningkatkan ketahanan budaya, memperkuat keutuhan NKRI, dan menciptakan suasana harmonis di banyaknya aneka ragam budaya di Indonesia,” tambah politisi asal Dapil Kepulauan Riau ini.

Penyelenggaraan kebudayaan, sebagaimana diatur di RUU, diarahkan kepada pemenuhan hak berkebudayaan, penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa, pemeliharaan serta pertahanan multikulturalisme. Selain itu, diarahkan pula penghargaan terhadap sejarah dan warisan budaya, pemajuan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, penguatan kelembagaan dan SDM kebudayaan, serta pelestarian prasarana dan sarana kebudayaan.

”Penghargaan sejarah dan warisan budaya melalui kebijakan penggunaan bahasa dan aksara daerah dalam sekolah (pendidikan, red). Selain itu, bahasa dan aksara daerah itu bisa digunakan untuk nama jalan ataupun tempat dan bangunan. Kebijakan penggunaan ini sudah sesuai dengan UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,” imbuh Asman.

Dalam pendidikan, nantinya murid akan diajarkan budaya lokal, atau bisa disebut budaya ibu. Diharapkan, dengan diajarkannya budaya lokal ini, anak-anak tidak kehilangan budaya lokal, maupun budaya nasional sejak dini.

”RUU ini juga mewajibkan sekolah

harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk meningkatkan derajat kemanusiaan bangsa Indonesia sehingga masyarakat terjamin kebebasannya dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Nilai budaya yang dipelihara dan dikembangkan harus didasari pada kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila,” jelas Ketua Panja RUU Kebudayaan Asman Abnur, ketika ditemui belum lama ini.

Dilatarbelakangi belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kebudayaan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Kebudayaan.

”Pencapaian kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak bisa lepas dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa yang menjadi simbol identitas ke-



Ketua Panja RUU Kebudayaan Asman Abnur.

di setiap daerah, untuk mengajarkan budaya lokal. Jadi, muatan lokal yang ada di daerah itu wajib diajarkan di sekolah. Murid wajib mempelajari budaya ibu. Kontennya kearifan lokal," tambah Asman.

Perlu Kementerian Khusus

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kebudayaan diatur juga mengenai hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Dalam rangka pengelolaan kebudayaan, undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk kementerian yang khusus menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-

dang kebudayaan.

"Sehingga, dengan adanya Kementerian yang khusus menangani pengelolaan kebudayaan ini dapat terwujud pengelolaan kebudayaan nasional Indonesia untuk meningkatkan ketahanan budaya nasional dan citra bangsa," jelas Asman.

Selain itu, dalam rangka pengendalian pelestarian kebudayaan, perlu dibentuk Komisi Perlindungan Kebudayaan yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan nilai budaya sebagai akibat pengaruh globalisasi. Komisi ini nantinya memiliki kewenangan untuk menetapkan status kegiatan kebudayaan yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.

"Komisi Perlindungan Kebudayaan akan bersifat independen, dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Tugasnya diantaranya menerima pengaduan masyarakat, dimana apabila terjadi kegiatan kebudayaan yang diduga menimbulkan dampak negatif di masyarakat," tam-

bah Asman.

Dengan adanya RUU Kebudayaan ini, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikan sarana dan prasarana kebudayaan. Sarana dan prasarana kebudayaan ini diantaranya museum, galeri seni, gedung seni pertunjukan, padepokan, pasar seni, dan lainnya.

"Untuk melestarikan sarana dan prasarana kebudayaan itu, bisa dilakukan dengan mendirikan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri. Bisa juga mendirikan padepokan, sanggar seni, maupun pasar seni," ujar Asman.

Asman menegaskan, RUU Kebudayaan merupakan RUU yang besar, dan UU sebagai pokok utama beberapa kebijakan yang sudah ada, misalnya UU Cagar Budaya, UU Perfilman, UU Kepariwisata, UU Sisdiknas, dan lain-lain. Ia optimis RUU ini dapat diselesaikan sebelum periode keanggotaan DPR 2009-2014 berakhir.

"Perkembangan terakhir, naskah akademik sudah di Badan Legislasi. Setelah reses ini selesai (11 Mei 2014), akan dilakukan sinkronisasi, kemudian masuk ke Badan Musyawarah, setelah itu baru dibawa ke Paripurna. Semoga RUU ini menjadi benteng untuk menjaga kebudayaan kita agar tidak terpengaruh oleh globalisasi," harap Asman. (sf) foto: sofyana, odjie/parle/od.





Setjen DPR Siap Songsong AEC 2015

Pasar tunggal ASEAN segera diberlakukan. Daya saing nasional di berbagai sektor tentu perlu pembenahan segera. Dan yang tidak kalah pentingnya kesiapan DPR RI sebagai lembaga yang menyusun berbagai produk legislasi untuk kepentingan nasional dalam menyongsong ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tentu memahami betul perannya menyukseskan AEC 2015 demi kepentingan nasional. Sebagai lembaga strategis penyusun produk perundang-undangan, Setjen DPR RI telah menyiapkan sumber daya yang mumpuni di bidang legislasi. Inilah yang coba disiapkan lewat Seminar bertajuk “Kesiapan Produk Legislasi Dalam Menyongsong Pemberlakuan ASEAN Economic Community 2015”.

Bertempat di ruang Pansus B Nusantara II, seminar yang diprakarsai



Sekjen DPR Winantuningtyastiti didampingi Deputi PUU K Johnson Rajagukguk.

Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI, pada Rabu (7/5), itu menghadirkan tiga pembicara, Bambang Prijambodo (staf ahli Menteri PPN), Bernardino Moningka Vega (Wakil Ketua Kadin Komite ASEAN), dan Rainer Louhanapessy (Minister Counsellor Permanent Mission of The Republic of Indonesia to ASEAN).

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti dalam sambutannya saat membuka seminar, mengatakan, sumber daya manusia bidang legislasi di Setjen DPR RI perlu memberi sumbangsih terbaik bagi para anggota DPR RI, agar menghasilkan produk legislasi yang baik pula. Dari seminar ini, para peserta bisa menggali berbagai pemikiran dan strategi menghadapi AEC 2015.

Sebelumnya, Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI, K Johnson Rajagukguk juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia perlu memahami pilar-pilar pemersatu ASEAN, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kesiapan pemerintah dan dunia usaha juga menjadi perhatian menarik menjelang AEC 2015 ini. Sejauh mana semua lini menyiapkan diri untuk AEC 2015. *(mh)/foto:andri/parle/iw.*



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima DPRD Gorontalo, Senin (5/5) Foto: Andry/Parle/Hr.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima DPRD Bone, Selasa (6/5) Foto: Andry/Parle/Hr.



Seminar Kesiapan Produk Legislasi dalam Menyongsong Pemberlakuan Asean Economic Community 2015 diselenggarakan oleh Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI, Rabu (7/5) Foto: Andry/Parle/HR.



Konferensi Pers Pansus RUU Panas Bumi Tentang Studi Banding ke Selandia Baru, Rabu (7/5). Foto: Naefurodji/Parle/HR.